**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Bagi AS isu program pengembangan nuklir Iran menjadi isu yang strategis karena tidak semata-mata persoalan mengenai pengembangan teknologi sumber energi alternative tetapi menembus ranah geopolitik dan keseimbangan kekuatan regional khususnya di kawasan Timur Tengah yang di dalamnya menyangkut eksistensi Israel sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah.[[1]](#footnote-2) Mengacu pada sumber di atas, bagi AS nuklir Iran dianggap lebih berbahaya di banding Korea Utara dan negara seperti India dan Pakistan yang diaanggap *de facto* negara pemilik senjata nuklir, kendati tidak di akui dan tidak di umumkan secara resmi. Di samping itu sudah menjadi rahasia umum bahwa Isreal diam-diam di bawah perlindungan AS memproduksi senjata nuklir dan beberapa kali menolak inpeksi yang di lakukan oleh *International Atomic Energy Agency (*IAEA) selaku pengawas dalam kepemiliikan nuklir di dunia.

Masalah proliferasi nuklir Iran dimulai ketika pada tahun 2002 kelompok oposisi *National Council of Resistance of Iran* (NCRI), mengungkapkan adanya program nuklir rahasia, termasuk pembangunan pabrik pengayaan uranium di Natanz dan reaktor air berat di Arak.[[2]](#footnote-3) Pengayaan uranium dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir, dan bahan bakar bekas dari reaktor air berat yang berisi plutonium dapat digunakan untuk membuat bom. Iran diduga tidak mematuhi NPT Safeguards Agreement, sehingga kecurigaan mengarah pada adanya upaya Iran untuk melangkah lebih jauh dan mengaya uranium ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.[[3]](#footnote-4)

Iran telah menandatangani *Non Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1968 sebagai negara nonsenjata nuklir dan meratifikasinya pada tahun 1970.[[4]](#footnote-5) Hal tersebut berarti bahwa semua kegiatan nuklir harus dilakukan dengan cara yang transparan kepada masyarakat internasional, dan berada di bawah kontrol penuh dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Namun sebaliknya, Iran terus menolak untuk melakukan kewajiban internasionalnya dan enggan bersikap kooperatif dengan IAEA.[[5]](#footnote-6)

Selama ini, pemerintah Iran menyatakan bahwa instalasi nuklirnya dibangun sepenuhnya untuk tujuan damai dan tidak pernah berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun, ketika IAEA melakukan inspeksi terhadap Iran, IAEA tidak dapat mengkonfirmasi pernyataan Iran tersebut. Sejauh ini, belum ada satu pihakpun yang mampu mengkonfirmasi bahwa nuklir Iran benar-benar bersifat damai.

Krisis nuklir Iran mencapai puncaknya setelah Iran berhasil menemukan Uranium di beberapa tambang yang ada di wilayah Yard. Sejak saat itu isu program nuklir Iran semakin memanas bahkan isu ini telah membengkakkan isu yang beredar, di mana seolah-olah dengan satu langkah lagi Iran akan mampu membuat bom nuklir.[[6]](#footnote-7) Orientasi dan politik luar negeri Iran pasca revolusi Iran pada tahun 1979 cenderung konfrotansional terhadap Barat, Iran berupaya menghindari intervensi Barat dengan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan Cina. Dan seringkali menentang kebijakan AS di kawasan Timur Tengah yang cenderung *double-standar.[[7]](#footnote-8)* Hal ini membuat dunia internasional memberikan reaksinya terutama AS beserta negara-negara yang tergabung dalam NWS (*Nuclear Weapon States*) yang diakui kepemilikan nuklirnya oleh NPT*.*

Bagi AS, Iran dianggap sebagai negara yang sangat agresif yang masih di kuasai oleh rezim yang fanatic dan radikal dan bukan tidak mungkin Iran akan memperkaya Uranium nya menjadi hulu ledak. Hal ini berdasarkan laporan badan IAEA, Iran telah memproduksi uranium sebayak 20% untuk program TRR(*Tehran research reactor*).[[8]](#footnote-9) Dimana jumlah tersebut bila terus di lakukan pegayaan diyakini cukup untuk memproduksi senjata nuklir yang membutuhkan uranium level 92% dari uranium 235. Iran sendiri beberapa kali menegaskan bahwa seluruh program nuklirnya dijtujukan untuk kepentingan damai yaitu sebagai sumber energi alternatif dan penelitian medis dan berada di bawah inpeksi IAEA, serta tunduk pada standarisasi dan perjanjian non-profilerasi.

Proliferasi nuklir Iran telah memicu Uni Eropa untuk turut serta dalam menekan Iran untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Uni Eropa memang berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap standar tertinggi terkait keamanan nuklir di Eropa dan di luar perbatasannya.[[9]](#footnote-10) Selain itu, Uni Eropa sangat mendukung NPT. Uni Eropa juga mempromosikan *confidence building* dan mendukung proses yang bertujuan untuk membangun zona bebas senjata pemusnah masal di Timur Tengah.[[10]](#footnote-11)

Penolakan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium menghasilkan tekanan dari dunia internasional khususnya negara-negara Barat. Bagi AS dan sebagian besar negara Eropa pengembangan nuklir Iran merupakan suatu ancaman bagi stabilitas dunia yang multipolar dan dikhawatirkan dapat menjadi bola salju kepemilikan senjata nuklir di seluruh penjuru dunia khususnya Negara *the axis of evil* seperti Venezuela yang dapat membawa dunia pada perang dunia ke 3 yakni perang nuklir. Nuklir Iran juga akan *mereduksi* kepentingan AS dan mengancam dominasi barat dalam politik keamanan kawasan Timur Tengah yang memiliki nilai stategis dalam politik dunia.[[11]](#footnote-12)

Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Uni Eropa, juga dikenal sebagai [P5 + 1 atau E3 / EU + 3](https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://ballotpedia.org/P5%252B1_and_E3%252B3) , mencapai kesepakatan bersejarah dengan Iran mengenai pengembangan program nuklirnya pada 14 Juli 2015.[[12]](#footnote-13) Sebuah perjanjian yang secara resmi dikenal sebagai [Joint](https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=id&u=http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/) *Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*, kesepakatan tersebut menekankan pada upaya-upaya pembatasan terhadap program nuklir Iran dan mekanisme pencabutan sanksi ekonomi Iran sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.[[13]](#footnote-14)

Namun menurut survei yang dilakukan pada bulan September 2015, rakyat Amerika umumnya memiliki pandangan yang kurang optimis terhadap kesepakatan tersebut dibadingkan dengan rakyat Iran. Iran lebih memandang positif kesepakatan tersebut dan percaya bahwa kesepakatan tersebut dapat meningkatkan hubungan bilateral Amerika Serikat dan Iran. Dua puluh satu persen orang Amerika menyetujui kesepakatan nuklir, dan 49 persen tidak setuju. Enam puluh delapan persen rakyat Iran menyetujui, dan hanya 10 persen tidak setuju. Selain itu, 51 persen rakyat Iran percaya kesepakatan tersebut akan meningkatkan hubungan bilateral Amerika Serikat-Iran, sementara hanya 18 persen orang Amerika yang mempercayai hal tersebut dapat tercapai.[[14]](#footnote-15)

Bukan saja mendapat respon yang beragam dari rakyat kedua negara kesepakatan nuklir Iran mendapat respon yang berbeda dari dua kubu partai politik di Amerika Serikat, Kongres terbagi menjadi dua suara terkait kesepakatan nuklir Iran tersebut, semua representasi Partai Republik menolak kesepakatan sementara mayoritas Partai Demokrat setuju dengan adanya kesepakatan nuklir Iran tersebut namun terdapat juga anggota yang menolak.[[15]](#footnote-16) Kesepakatan Nuklir memerlukan *goodwill* dari semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini, berdasarkan pada bervariasinya respons terhadap kesepakatan ini, hal ini menyebabkan implementasi kesepakatan menjadi sangat bergantung kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terutama Amerika Serikat yang sangat *concern* terhadap masalah pengembangan nuklir Iran.

Isu nuklir Iran dan kesepakatan nuklir Iran menjadi salah satu hal yang menjadi isu penting dalam perjalanan pemilu Amerika Serikat pada November 2016, mengingat kesepakatan nuklir Iran ini disepakati di saat kepemimpinan Presiden Barrack Obama hampir menyelesaikan masa periode jabatan keduanya. Dengan adanya pergantian Presiden tentu dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, seperti pada rezim George W. Bush yang mengandalkan *hard power* dalam pendekatan politik luar negerinya, sedangkan Barack Obama yang cenderung ingin mengubah pendekatan politik luar negeri Amerika Serikat ke arah *soft power* melalu media diplomasi.

Kandidat calon Presiden Amerika Serikat selanjutnya sudah terkerucut, kedua partai telah memiliki kandidat calon Presiden yang akan diusung, Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Keduanya memiliki pandangan masing-masing mengenai kesepakatan nuklir ini, Hillary Clinton walaupun mendukung kesepakatan ini namun menunjukkan sikap skeptis bahkan akan melakukan apapun untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutunya bahkan jika harus menempuh jalur militer terkait kesepakatan nuklir Iran.[[16]](#footnote-17) Donald Trump bersikap lebih keras terhadap kesepakatan nuklir ini, ia bahkan menganggap kesepakatan ini sangat merugikan Amerika Serikat dan menunjukkan kelemahan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan bahwa ia akan merenegosiasi ulang kesepakatan tersebut bahkan tidak akan melanjutkan kesepakatan nuklir Iran. [[17]](#footnote-18)

Atas dasar uraian di atas penulis mengajukan judul skripsi sebagai berikut :

“***Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengembangan Nuklir***”

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana respons dan reaksi Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran?
2. Apa yang dihasilkan dalam kesepakatan nuklir Iran dan bagaimana kesepakatan tersebut berdampak terhadap program pengembangan nuklir Iran?
3. Bagaimana kebijakan luar negeri Iran pasca penandatanganan JCPOA?

**1.2.1 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas penulis perlu melakukan pembatasan masalah dengan menitik beratkan kepada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran.

**1.2.2 Perumusan Masalah**

Guna mempermudah penelitian dan memperjelas masalah penelitian, maka dibuat sebuah perumusan masalah sebagai berikut :

***“ Bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat berpengaruh terhadap program pengembangan nuklir Iran?”***

**1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana respons Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran.
2. Untuk mengetahui apa saja yang dihasilkan dalam kesepakatan nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action) dan dampaknya terhadap program pengembangan nuklir Iran.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Iran pasca menandatangani JCPOA.

**1.3.1 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan dokumen akademik yang berguna bagi sivitas akaademika Universitas Pasundan, khususnya FISIP, Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi untuk dapat dijadikan acuan dalam proses penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
3. Sebagai syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

**1.4 Kerangka Teoritis**

Salah satu wujud interaksi dalam hubungan internasional yaitu politik internasional yang di dalamnya terkandung elemen-elemen kerjasama dan konflik. Politik internasional bisa didefinisikan sebagai *struggle for power* seperti yang dinyatakan Hans Morgenthau.

Politik internasional menurut Morgenthau adalah perjuangan dan penggunaan kekuasaan (*power*) bangsa demi mencapai *national interest*. Sementara itu menurut Couloumbis dan Wolfe unsur *power* terdiri dari daya paksa (*force* atau *hard power*) yaitu ancaman atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh negara untuk tujuan politiknya. Unsur berikutnya yaitu pengaruh (*influence* atau *soft power*) yaitu penggunaan alat-alat persuasi tanpa kekerasan oleh negara dan unsur wewenang (*authority*) yaitu sikap tunduk sukarela pada arahan yang diberikan karena penghormatan, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian.[[18]](#footnote-19)

Politik Internasional dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari politik luar negeri suatu negara, karena mengandung daripada tujuan-tujuan nasional suatu bangsa di luar dari batas wilayahnya. Ini merupakan gambaran yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumamaatmadja, yaitu :

“Politik Internasional pada hakekatnya alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya, politik luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang” [[19]](#footnote-20)

Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Ray Olton dalam *Kamus Hubungan Internasional*, Politik Luar Negeri adalah “strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional”[[20]](#footnote-21)

Sesuai dengan kajian penelitian ini, politik luar negeri dapat dikategorikan menjadi pengaruh (aspek power) yang pada dasarnya merupakan perangkat untuk mencapai tujuan, kapabilitas yang merupakan kekuatan mental/fisik kualitas yang dimilik dan dapat digunakan sebagai perangkat pendesak untuk membujuk, pemberi imbalan, mengancam dan memberikan sanksi; respon terhadap negara lain (respon terhadap situasi atau stimulus merupakan reaksi)[[21]](#footnote-22)

Pemikiran mengenai politik luar negeri menurut Rosenau dibagi menjadi tiga kategori, yang ruang lingkupnya mulai dari bersifat umum sampai yang bersifat khusus, yaitu : *General foreign policy* (orientasi); *Strategic foreign policy* (strategi); *Day to day implementation* (tindakan)[[22]](#footnote-23)

Konsep kunci dalam politik luar negeri adalah kebijakan, dimana kebijakan merupakan tindakan-tindakan, yakni bentuk komunikasi yang diharapkan mampu mengubah atau mempertahankan perilaku negara berakibat pada pemerintah negara tersebut berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara, mencakup pemilihan tujuan-tujuan, memobilisasi alat-alat pencapaian tujuan tersebut merupakan implementasi atau usaha-usaha nyata dan sumber-sumber yang diperlukan untuk pencapaian tersebut.[[23]](#footnote-24)

Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah ide atau gagasan atau tindakan yang dirumuskan oleh pembuat keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, melakukan perubahan dalam kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara, aktor non-negara atau lingkungan dunia.[[24]](#footnote-25)

Faktor-faktor eksternal mempengaruhi substansi kebijakan luar negeri yang meliputi kondisi perekonomian dunia, struktur sistem internasional, kebijakan dan tindakan negara lain, hukum internasional, masalah global dan regional yang muncul dari kegiatan individual, serta opini global . Sementara itu, faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yaitu kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, struktur pemerintahan, letak geografis, opini publik, pertimbangan etis, serta birokrasi.[[25]](#footnote-26)

Kebijakan luar negeri suatu negara akan mempengaruhi hubungan antarnegara. Kebijakan luar negeri tersebut mencerminkan kepentingan dalam negeri nya yang akan dipromosikan ke luar negeri. Dengan kata lain kebijakan luar negeri suatu negara merupakan bagian dari politik dalam negerinya dan oleh karenanya kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri memiliki tujuan yang sama.[[26]](#footnote-27)

Kebijakan luar negeri menurut John P. mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri sebagai orientasi
2. Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as a set of commitment to and plan for action), dan
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi dimana dalam fase ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian situasi di lingkungan eksternal[[27]](#footnote-28)

Terkait dengan ini, kebijakan luar negeri yang disusun oleh AS tidak terlepas dari pemikiran kelompok Neo-konservatif AS yang bekerjasama dengan kelompok Neo-liberalis AS. Kedua kelompok ini memiliki tujuan yang sama yakni menekan dan melakukan ekspansi dengancara baru lebih bersifat *soft power* yang disebut dengan new-imperialism dari ekspansi AS sebelumnya pasca Perang Dunia II. Neo-konservatif dan Neo-liberalis memiliki perbedaan ideologi dan cara penekanan. Bila Neo-konservatif menekankan kebijakan yang bersifat *hard power* yaitu menggunakan jalur militer dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Sebaliknya Neo-liberal cenderung memilih jalur ekonomi dengan menerapkan ekonomi global, deregulasi mata uang dan penyebaran industri global seperti MNC/TNC Multi/TransNational Corporation di negara-negara maju dan berkembang.

Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama yakni melanjutkan imperialisme AS dengan cara baru atau disebut dengan Neo-imperialisme. Hubungan antara kedua kelompok ini sangat erat dan sama-sama melihat kondisi melalui fenomena sosial yang terjadi.[[28]](#footnote-29)

Berikutnya, menurut Annie Tracey Samuel dari “Research Fellow In International Security Program*” pada Harvard Kennnedy School’s Belfer Center For Science And International Affairs*, bahwa selama ini kebijakan Iran menggunakan pendekatan represif dalam mencapai sasaran strategi politik luar negerinya. Tujuan dan arah kebijakan luar negeri Iran yaitu untuk supremasi politik atau keamanan rezim jangka panjang dan keseimbangan regional di kawasan Timur Tengah yang di dominasi AS dan Israel oleh karena itu senjata nuklir menjadi instrument efektif dalam mencapai tujuan kebijakan Iran.[[29]](#footnote-30) Keberhasilan Iran dalam mengembangkan nuklir menjadi ancaman bagi AS akan kepentingan-kepentingannya. Mengingat Iran yang tidak kooperatif terhadap AS. Bagaimanapun program nuklir yang terus di kembangkan oleh Iran merupakan bentuk kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah Iran guna memenuhi kepentingan nasionalnya.

Terkait dengan ini juga, kepentingan nasional mencakup berbagai hal, hal ini diungkapkan oleh Jack C. Plano dengan mengidentifikasikan kepentingan nasional dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda, sebagai berikut:

“Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”[[30]](#footnote-31)

Adapun pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi yang memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. *Peran Internasional Atomic Energy Agency* (IAEA) sebagai organisasi internasional yang mengawasi perkembangan teknologi nuklir agar tetap di kembnagkan untuk tujuan damai dan tifdak membelok kearah pengembangan senjata nuklir. Sesuai dengan isi statuta IAEA.
2. *Treaty On The Non Proliferation Of Nuclear Weapon* (NPT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama yaitu : Nonproliferasi, perlucutan senjata, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dan
3. *Safeguard* adalah sebuah sistem yang berisi pengaturan lebih luas mengenai tindakan teknis dimana sekretariat IAEA memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dari pengumuman yang dibuat oleh negara mengenai materi dan aktifitas nuklir.[[31]](#footnote-32)

Disini Iran membuat kebijakan luar negerinya dengan terus pengembangan nuklirnya. Iran masuk dalam kelompok negara *Non-Profilerasi Nuklir* (NPT) sejak tahun 1970 menurut pemerintah Iran semua aktifitas nuklirnya di maksudkan untuk tujuan damai. Alasan utama Iran ialah melakukan kembali pengayaan uranium tenaga nuklir ini untuk kepentingan energi security guna memenuhi suplai energi bagi masyarakatnya, dengan menggunakan energi alternatif berarti Iran menghemat bahan bakar fosil yang semakin menipis jumlahnya.

Sebagai instrumen dalam politik luar negeri adalah diplomasi dan kebijakan luar negeri mempengaruhi kegiatan diplomasi bagi negara-negara yang melakukannya. Maka diplomasi yang dilakukan negara-negara harus selalu sejalan dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Paada umumnya, ada dua elemen dasar yang menyebabkan negara-negara melakukan diplomasi yakni adanya kepentingan bersama (*common interest*) dan adanya isu yang dipersengketakan (*issues of conflict*).[[32]](#footnote-33)

Berdasarkan aktornya, diplomasi ada yang bersifat bilateral (dua negara), regional (negara-negara kawasan), dan multilateral (banyak negara). Maka dalam skripsi ini terjadi diplomasi multilateral yang melibatkan banyak negara. Diplomasi multilateral dapat didefinisikan sebagai negosiasi dan diskusi yang memungkinkan tindakan kolektif dan kerjasama antar negara ataupun aktor non-negara.

Pada dasarnya diplomasi multilateral merupakan diplomasi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Diplomasi multilateral ini berhasil menjadi cara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan negosiasi antara banyak pihak, selain sebagai pendorong diplomasi bilateral.[[33]](#footnote-34) Poin ini mengandung dua aspek, pertama diplomasi multilateral memberi kesempatan untuk membahas masalah-masalah di luar agenda formal dan yang menjadi perhatian bersama. Kedua, mediator yang memiliki kekuasaan penuh dapat menyelenggarakan konferensi multilateral sebagai upaya memulai negosiasi bilateral untuk membahas masalah mendasar yang sebelumnya diselenggarakan di tempat lain.

Dalam diplomasi multilateral, komunikasi dilakukan secara verbal melalui diskusi dan perdebatan. Diplomasi semacam ini ditandai dengan adanya beragam masalah yang akan dibahas, ruang lingkup yang lebih luas, dan jumlah negara yang hadir.[[34]](#footnote-35) Diplomasi multilateral memiliki berbagai keuntungan. *Pertama*, kemungkinan mengkonsolidasikan perpecahan. Suatu masalah dapat tetap diamati terus menerus. *Kedua*, memunculkan sebuah *lobby* untuk menyelesaikan masalah.Selanjutnya, negara-negara yang membutuhkan dapat diberikan bantuan teknis.[[35]](#footnote-36)

Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan teori permainan (*game theory*) hubungan internasional terkemuka Bruce Bueno de Mesquita tentang Iran yakni: “*there is nothing the United States can do to prevent Iran from pursuing nuclear energy?the more aggressively the U.S responds to Iran, the more likely it is that Iran will develop nuclear weapons.”*[[36]](#footnote-37) Berkaitan dengan pernyataan di atas maka AS perlu menggunakan cara lain dalam menekan program pengembangan nuklir Iran, jalan diplomasi adalah jalan yang paling tepat mengingat berbagai sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Iran tidak mengurangi keinginan Iran untuk terus mengembangkan program nuklir. Maka mulailah dibentuk sebuah kelompok antar negara untuk memecahkan krisis nuklir Iran. Pada Juni 2003 Inggris, Prancis dan Jerman atau EU-3 memprakarsai langkah diplomasi menghadapi ancaman program pengembangan nuklir Iran. Semenjak itu dimulailah serangkaian upaya diplomasi dalam menanggulangi program pengembangan nuklir Iran, dan pada 2006 kelompok tersebut menjadi lebih besar setelah Cina, Rusia dan AS ikut bergabung, semenjak itu pula lah kelompok P5+1 terbentuk.[[37]](#footnote-38)

Pada akhirnya, pada 14 Juli 2015, semua pihak setuju untuk perjanjian nuklir yang komprehensif. JCPOA adalah perjanjian internasional mengenai program nuklir Iran yang disepakati di Wina pada 14 Juli 2015 antara Iran, P5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat ditambah Jerman). Negosiasi formal menuju JCPOA pada program nuklir Iran dimulai dengan penerapan *Joint Plan of Action*, sebuah kesepakatan interim pada program nuklir Iran yang ditandatangani antara Iran dan negara P5+1 pada bulan November 2013. Selama dua puluh bulan ke depan, Iran dan negara P5+1 yang terlibat dalam negosiasi, dan pada bulan April 2015 disepakati perjanjian kerangka kerja untuk kesepakatan akhir. Pada bulan Juli 2015, Iran dan P5+1 menyepakati JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*).[[38]](#footnote-39)

Ditinjau dari segi norma yang berlaku, harusnya setiap negara yang telah melakukan perjanjian wajib mempertanggung jawabkan hasil dari perjanjian dan tidak melanggarnya. Jika dilihat dari jenis perjanjian internasional maka JCPOA termasuk perjanjian multilateral, adapun definisi dari perjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan peserta dari perjanjian ini.[[39]](#footnote-40)

Namun, sebuah perjanjian internasional dapat dibatalkan menurut Konvensi Wina 1969, sebagai berikut :

1. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu negara peserta.
2. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat.
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta yang lain pada waktu pembentukan perjanjian.
4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (*corruption*), baik melalui kelicikan atau penyuapan.
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman atau dengan penggunaan kekuatan.
6. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional.[[40]](#footnote-41)

Berdasarkan hal tersebut, JCPOA sebagai sebuah perjanjian internasional sudah dirumuskan bagaimana mekanisme pembatalan berlakunya JCPOA itu sendiri dalam pasal 36 dan 37 tentang mekanisme penyelesaian sengketa antar negara yang terlibat dalam kesepakatan, jika selama berlangsungnya proses implementasi kesepakatan tersebut terdapat sengketa, hingga pembatalan kesepakatan tersebut.

Dari kerangka pemikiran di atas, maka beberapa asumsi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait program pengembangan nuklir Iran, AS bersikap responsif dan reaktif terhadap program tersebut.
2. Upaya penyelesaian polemik nuklir Iran dilakukan dengan cara perundingan kelompok P5+1 dengan Iran untuk mencegah tindakan-tindakan agresif.
3. Pengimplementasian JCPOA sangat bergantung terhadap *good faith* negara-negara yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
4. Jika terjadi perubahan kebijakan luar negeri AS terutama terkait program pengembangan nuklir Iran dapat mempengaruhi berlangsungnya implementasi dari JCPOA.

**1.4.1 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“**Dengan ditandatangani dan diimplemtasikannya *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), maka program pengembangan nuklir Iran dapat dikendalikan dan terpantau sehingga tidak mengarah pada pengembangan senjata nuklir**”

**1.4.2 Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

**Tabel 1**

**Operasional Tabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas :  Dengan ditandatangani dan diimplentasikannya *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) | 1. Adanya tekanan Internasional terhadap program pengembangan nuklir oleh Iran 2. Adanya upaya penyelesaian krisis nuklir Iran 3. Tercapainya kesepakatan kerangka penyelesaian masalah nuklir Iran | 1. Data (fakta) mengenai adanya tekanan Internasional terhadap program pengembangan nuklir Iran   Sumber:  <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/info%20singkat-IV-4-11-P3D1->   1. Data (fakta) adanya upaya penyelesaian krisis nuklir Iran   Sumber: <http://www.voaindonesia.com/content/perundingan-nuklir-di-baghdad-temui-hambatan/940313.html>   1. Data (fakta) mengenai tercapainya kesepakatan kerangka penyelesaian masalah nuklir Iran   Sumber: https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/ |
| Variabel Terikat :  Program Nuklir Iran dapat dikendalikan dan terpantau sehingga tidak mengarah pada pengembangan senjata nuklir | 1. Adanya ketentuan dalam kesepakatan yang harus ditaati oleh Iran 2. Iran menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut 3. Adanya laporan yang menunjukkan komitmen Iran dalam melaksanakan ketentuan JCPOA | 1. Data (fakta) adanya ketentuan dalam kesepakatan yang harus ditaati oleh Iran   Sumber: https://www.state.gov/documents/organization/245317.pdf   1. Data (fakta) yang menunjukkan komitmen Iran dalam mengimplementasikan kesepakatan   Sumber: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-removes-arak-nuclear-reactor-core-and-fills-with-concrete-a6806941.html   1. Data (fakta) mengenai laporan yang menyatakan komitmen Iran dalam melaksanakan ketentuan JCPOA   Sumber: https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/iaea-director-general-yukiya-amanos-statement-iran |

**1.5 Tingkat Analisis**

Untuk medeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan maka harus dilakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikas tingkat eskplanasi demi memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat analisis kolerasionis yaitu unit ekplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Unit ekplanasi pada penelitian ini yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait program pengembangan nuklir Iran dan unit analisanya yaitu program pengembangan nuklir Iran.

**1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Metode penelitian Deskriptif Analitis. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang telah ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
2. Metode penelitian Historis. Digunakan untuk mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, untuk memberikan interpretasi dari trend yang naik-turun dari suatu keadaan dari suatu keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan yang akan datang[[41]](#footnote-42), serta merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman di masa lalu, yang masih ada kaitannnya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan terus berlangsung saat ini terhadap konteks permasalahan yang dihadapi. Terdapat perspektif historis, yaitu cara memandang fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau yang dapat dipergunakan untuk mendukung peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini[[42]](#footnote-43).

**1.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature) dengan mempelajari informasi-informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat di mana penulis melakukan penelaahan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, dan lainnya. Terdapat pula sumber yang berasal dari perpustakaan, internet maupun instansi pemerintah, lembaga-lembaga resmi atau lembaga-lembaga penelitian lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

**1.8 Lokasi dan Lama Penelitian**

**1.8.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yang dianggap membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Ada pun lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Fisip Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Dalam No. 17 D, Kota Bandung

1. Perpustakaan Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 94 Kota Bandung

1. Perpustakaan Universitas Padjajaran

Jl. Dipati Ukur No.46, Kota Bandung

1. Perpustakaan Universitas Indonesia

Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

**1.8.2 Lama Penelitian**

Penelitian ini diprogramkan selama 6 bulan, yaitu dimulai dari bulan April dan selesai pada bulan Oktober 2017, yang dimulai dari persiapan judul, pembuatan proposal penelitian, pencarian data dan pengolahan data.

**1.9 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka teoritis dan hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator, skema kerangka teoritis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan juga lokasi dan lamanya penelitian.

**BAB II OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab II berisi uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, yaitu konsep yang menggambarkan masalah tersebut. Di sini penulis menjelaskan secara umum mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya terehadap Iran

**BAB III OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab III berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang akan dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain. Pada penyusunan skripsi ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah program pengembangan nuklir Iran.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V KESIMPULAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil penelitian yang telah dilakukan

**BAB II**

**KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TENTANG NUKLIR**

**2.1. Politik Global Amerika Serikat**

Pada awal kemerdekaan AS yang dideklarasikan pada tanggal 4 Juli 1776 politik luar negeri AS yang bersifat ekspansionis belum terlihat nyata. Hal ini dikarenakan masih banyak urusan dalam negeri AS yang harus dibenahi dan dikonsolidasikan. Misalnya, semua negara bagian AS masih memerlukan perlindungan dan pembenahan pasca memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya.[[43]](#footnote-44) Sejak merdeka, AS menerapkan pemerintahan federal yang didasarkan pada konstitusi yang menyatakan bahwa dalam rangka awal kemerdekaan pemerintah federal ini harus dapat melindungi seluruh negara bagian AS dari ancaman dan serangan luar dan ancaman kekerasan dalam negeri.[[44]](#footnote-45) Misalnya, pemerintah federal AS harus dapat membendung serangan-serangan militer Inggris Raya pasca pelepasan wilayah jajahannya. Hal ini dikarenakan keadaan AS yang baru merdeka masih sangat rentan mengalami konflik internal karena keadaan infrastruktur AS yang belum tersusun dengan baik. [[45]](#footnote-46)

Presiden pertama AS yaitu George Washington yang menjadi Presiden AS pada 1776 memiliki kebijakan luar negeri yang bersikap netral dan melakukan kerjasama dengan negara-negara Eropa.[[46]](#footnote-47) Kerjasama ini dibangun atas dasar mutualisme yakni kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak AS dengan negara-negara Eropa. Alamudi mengatakan bahwa menurut Presiden George Washington, setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya, AS membutuhkan kerjasama dengan negara-negara kaya Eropa untuk membangun sektor internal. Oleh sebab itu, AS meyakinkan keadaan dalam negeri yang aman kepada negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Spanyol dengan tujuan negara-negara tersebut mau mengadakan kerjasama ekonomi dengan AS.[[47]](#footnote-48)

Menurut Hendrajit politik luar negeri AS yang ekspansionis mulai terlihat ketika AS dipimpin oleh Presiden James Monroe yang menjadi Presiden AS pada tahun 1823. Walaupun Presiden Monroe masih menerapkan prinsip netral, namun keinginan untuk menjadi negara kuat, mapan dan mandiri mulai terlihat. Presiden Monroe menginginkan agar AS dikatakan sebagai negara yang patut diperhitungkan oleh negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, ekspansi pertama AS dilancarkan pada masa kepemimpinan Presiden Monroe dengan megincar wilayah Amerika Latin.[[48]](#footnote-49) Smith memaparkan terdapat dua alasan yang menjadikan Amerika Latin sebagai target pertama ekspansi politik luar negeri AS, pertama, AS ingin menunjukkan ketangguhannya untuk menjaga dan mengatur dunia dimulai dari kawasan terdekatnya yakni Amerika Latin. Kedua, pelebaran sayap kapitalis AS untuk membuka akses pasar di Amerika Latin.[[49]](#footnote-50)

Pada era sebelum meletusnya Perang Dunia I yakni pada 1916, AS memperlunak politik luar negerinya yang bersifat ekspansionis. Bahkan ketika Perang Dunia I meletus AS menyatakan tidak ingin terlibat. Akan tetapi, secara perlahan ketika supremasi militer angkatan laut AS diganggu oleh Jerman, perilaku agresor militer AS mulai terlihat kembali. Setelah kapal-kapal dagang milik AS ditenggelamkan oleh Jerman pada1917, AS menyatakan perang terbuka terhadap Jerman pada Perang Dunia I.[[50]](#footnote-51) Pasca Perang Dunia I, AS muncul sebagai negara pemenang dan mulai terlibat dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Misalnya, AS dibawah Presiden Woodrow Wilson mempelopori terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Januari 1920 dengan tujuan terwujudnya perdamaian dunia dan rekonstruksi kesejahteraan global pasca Perang Dunia I.[[51]](#footnote-52) Akan tetapi, keberadaan LBB ini tidak bertahan lama, dikarenakan dasar politik luar negeri AS yang ekspansionis dan sistem internasional yang anarkis sehingga menyebabkan meletusnya kemelut Perang Dunia II pada 1939.

Memasuki Perang Dunia II, AS semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Hendrajit menambahkan bahwa AS yang terlibat langsung dalam Perang Dunia II menganggap bahwa keterlibatannya adalah karena AS sebagai polisi dunia berhak untuk turut serta menjaga dan membantu Sekutu-sekutunya yakni Inggris, Polandia dan Perancis dari serangan-serangan militer Jerman dan Italia. Terlebih pelabuhan militer AS Pearl Harbor pun ikut diserang oleh pasukan Jepang. Keadaan ini semakin memperkeruh kondisi internasional pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II. Kemudian, kelompok sekutu yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia II yang dipimpin oleh AS semakin melebarkan sayapnya untuk melanjutkan kiprahnya di dunia. AS bersama negara-negara sekutu lainnya yakni Inggris, Perancis dan Polandiakembali membawa dunia ke tatanan perdamaian.[[52]](#footnote-53)

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, AS melakukan pembangunan di wilayah Eropa Barat yang mengalami kehancuran akibat perang melalui kucuran dana yang disebut dengan Marshall Plan.[[53]](#footnote-54) Dengan itulah secara mudah Eropa Barat menjadi sekutu AS dan berada diorbit genggaman AS. Selain itu, AS juga mulai memperlunak kebijakan luar negeri ekspansionisnya. Justru sebaliknya AS mulai membangun dunia lebih ke arah perdamaian dan kerjasama multilateral. Faktanya, AS merupakan negara pelopor atas terbentuknya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 24 Oktober 1945, yang sebelumnya AS juga merupakan pelopor terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada 10 Januari 1920, juga disusul dengan berdirinya IMF International Monetary Fund pada 27 Desember 1945, dan World Bank bersamaan dengan dibentuknya IMF.[[54]](#footnote-55) Berdirinya badan-badan internasional tersebut tidak terlepas dari dorongan AS yang menginginkan tatanan dunia yang damai dan kooperatif. Pada lembaga IMF dan World Bank, AS merupakan penyandang dana terbesar dengan tujuan membantu perekonomian negara-negara lain yang sedang berkembang.[[55]](#footnote-56)

Terbentuknya PBB juga merupakan wujud dari keinginan AS untuk menjadikan tatanan dunia menuju arah perdamaian dan kesejahteraan. Akan tetapiidealisme tentang tatanan dunia baru yang damai yang sepenuhnya diatur oleh PBB dan hukum internasional tidak berlangsung lama. Munculnya perang dingin Cold War antara blok Barat kapitalis yang dipimpin oleh AS melawan blok Timur komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet (Sekarang Rusia) mengikis supremasi kedaulatan PBB sebagai badan internasional tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan selama Perang Dingin terjadi, sistem internasional lebih dikontrol oleh perimbangan kekuatan Balance of Power antara kedua blok ketimbang diatur oleh PBB.[[56]](#footnote-57) Selain itu, selama Perang Dingin berlangsung antara AS dan Uni Soviet tidak melakukan serangan-serangan langsung terbuka oleh kedua negara. AS dan Uni Soviet lebih mengincar pengaruh global dengan membentuk blok pertahanan masing-masing yang bertujuan menarik negara-negara netral untuk tidak berpihak pada blok lawan.[[57]](#footnote-58)

Pada saat berlangsungnya Perang Dingin, AS menerapkan kebijakan mengenai proliferasi senjata nuklir. Salah satu bentuknya adalah dengan mempelopori terbentuknya perjanjian NPT pada 1968 (Nuclear-Non Proliferation Treaty).[[58]](#footnote-59) Perjanjian NPT dimaksudkan untuk membatasi jumlah pemilik senjata nuklir hanya kepada negara anggota tetap DK-PBB yakni AS, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris. Adanya persaingan antara AS dan Uni Soviet (Sekarang Rusia) menyebabkan kedua negara tersebut saling berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklir sebagai upaya deterrence power.[[59]](#footnote-60) Selain itu, Winingsih menambahkan bahwa AS berupaya agar negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Hal ini dikarenakan AS khawatir kepentingannya terganggu dengan adanya pengembangan nuklir negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan AS.[[60]](#footnote-61)

Untuk megatasi hal tersebut, maka AS menerapkan kebijakan standar ganda mengenai nuklir. Standar ganda tersebut dengan membantu pengembangan senjata nuklir milik India, Pakistan, dan Israel yang pada dasarnya tidak terdaftar dalam perjanjian NPT dan badan IAEA.[[61]](#footnote-62) Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut merupakan sekutu AS, terutama Israel yang begitu penting bagi AS untuk dapat melawan pengembangan nuklir Iran di kawasan Timur Tengah (Rahman 2003, h. 206).[[62]](#footnote-63) Hingga perang dingin berakhir pada 1991 yang dimenangkan oleh AS, kebijakan standar ganda nuklir yang diterapkan AS tersebut terus diberlakukan. Hal ini semakin menunjukkan sikap ketidakadilan AS terhadap negara-negara yang mengembangkan nuklir dan telah tunduk dibawah aturan NPT dan IAEA.[[63]](#footnote-64)

Kemudian, Anwar mengatakan bahwa pasca Perang Dingin di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton periode 1992-1996 dan 1996-2000, kebijakan luar negeri AS berubah dari unilateralis menjadi multilateralis. Presiden Clinton lebih mengedepankan multilateralisme (kerjasama dengan berbagai negara) ketimbang unilateralisme (sikap melakukan tindakan sepihak tanpa memperdulikan kedaulatan negara lain) dengan mengedepankan kerjasama dan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa internasional.[[64]](#footnote-65) Hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Partai Demokrat sebagai Partai Presiden Clinton. Anwar menambahkan bahwa Partai Demokrat sangat mengedepankan pada proses multilateral dan kerjasama internasional. Selain itu, Partai Demokrat sering disebut dengan kelompok *Dove* karena lebih mengutamakan penggunaan diplomasi daripada jalur militer dalam menyelesaikan konflik. Para anggota Partai Demokrat lebih mengedepankan pelebaran pengaruh AS ke seluruh dunia dengan menempuh nilai-nilai soft power.[[65]](#footnote-66) Kemudian, Nye mengatakan bahwa bentuk soft power AS tersebut misalnya dengan mempromosikan nilai demokrasi, menjunjung Hak Asasi Manusia, menyebarkan konsep ekonomi liberal dan memberikan bantuan finansial bagi negara yang membutuhkan pinjaman ataupun pemberian dana akibat krisis yang melanda suatu negara. Tidak hanya itu, Nye juga menilai bahwa soft powersangat berperan dalam menumbuhkan pengaruh AS di dunia.[[66]](#footnote-67)

Di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush periode 2000-2004 dan 2004-2008, kebijakan luar negeri AS kembali menjadi unilateralis. Kebijakan luar negeri Presiden Bush yang demikian dipengaruhi oleh nilai-nilai Partai Republik yang merupakan Partai Presiden Bush. Anwar (2003, h. 16) mengatakan bahwa Partai Republik menganggap politik internasional didominasi oleh persaingan militer antar Negara untuk menentukan negara mana yang paling dominan.[[67]](#footnote-68) Oleh sebab itu, Partai Republik sering disebut sebagai kelompok *Hawkish* yang dikuasai oleh orang-orang Neo-konservatif AS, hal ini dikarenakan Partai Republik lebih mengedepankan cara hard poweryakni lebih mengutamakan jalur ekspansif dan militeristik dalam penyusunan kebijakan dan strategi luar negerinya.[[68]](#footnote-69) Namun demikian, Nye mengatakan bahwa antara hard power dan soft power sama-sama penting dan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kebijakan luar negeri AS.[[69]](#footnote-70)

Waltz mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya sikap arogansi dan unilateralisme AS. Pertama, runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin sehingga AS merupakan satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Dengan sendirinya tidak ada negara lain yang berani menghalangi keinginan AS untuk mengambil tindakan demi menjaga kepentingan nasionalnya. Kedua, kekuatan ekonomi AS yang sangat dominan melebihi Uni Eropa dan Jepang. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan AS pada perdagangan internasional relatif rendah mengingat 90 persen dari produksinya untuk konsumsi dalam negeri dan pasar AS merupakan tujuan ekspor utama bagi negara-negara lain. Ketiga, kenyataan bahwa kemampuan militer AS merupakan terbesar di dunia cenderung meningkat.[[70]](#footnote-71) Walaupun Perang Dingin telah berakhir, AS tetap meningkatkan anggaran belanja militernya untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan meningkatkan kemampuan militer Sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization).[[71]](#footnote-72)

Sikap unilateralisme AS semakin terlihat pasca tragedi 9/11. Tragedi ini sekaligus memalukan AS yang dalam sejarahnya tidak pernah terkena dampak buruk oleh serangan-serangan dari luar. Pasca tragedi ini, AS di bawah kepemimpinan Presiden Bush semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai negara adidaya. Jinsa Online melaporkan bahwa Presiden Bush mengeluarkan doktrinya yang dikenal dengan sebutan “Doktrin Bush” yang pertama kali dikeluarkan pada 1 Juni 2002 dihadapan wisudawan Akademi militer AS West Point.[[72]](#footnote-73) Isi doktrin tersebut adalah:

*We cannot defend America and our friends by hoping for the best. We cannot put our faiths in the word of tyrants who solemnly sign non-proliferation treaties and then systematically break them. If we wait for threats to fully materialize we will have waited too long.*

Kita tidak dapat mempertahankan Amerika dan sekutu kita dengan berharap yang terbaik. Kita tidak dapat menaruh kepercayaan kepada negara pembangkang yang menandatangani perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir yang kemudian mereka melanggarnya. Jika kita menunggu ancaman sampai terjadi maka kita akan menunggu terlalu lama.

Selain itu, Jinsa Online juga menambahkan Doktrin perkataan Bush selebihnya yaitu:

*the war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans and confront the worst threats before they emerge. A military that must be ready to strike at a moment’s notice in any dark corner of the world.*

Perang melawan terorisme tidak akan dimenangkan dengan cara bertahan. Kita harus mengambil langkah perang, mengganggu rencana mereka dan mengkonfrontasi sebelum ancaman terburuk terjadi. Militer harus siap untuk menyerang sekalipun di ujung dunia.

Pandangan inilah yang merupakan kelanjutan dari Doktrin Pre-emptive strike (melakukan penyerangan terhadap musuh sebelum musuh melakukan ancaman dan mengambil tindakan lebih).[[73]](#footnote-74) Doktrin Pre-emptive striketersebut merupakan doktrin yang diusung oleh Presiden Bush beserta tokoh-tokoh Neo-konservatif AS yang berpandangan unilateralisme.[[74]](#footnote-75) Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Richard Perle sebagai Kepala Dewan Kebijakan Pertahanan, dan Paul Wolfowitz sebagai Wakil Menteri Pertahanan.[[75]](#footnote-76) Oleh sebab itu, bentuk formulasi kebijakan luar negeri AS tidak terlepas dari peran tokoh Neo-konservatif AS tersebut yang disebut dengan *invisible government*.[[76]](#footnote-77)

**2.2. Perkembangan dan Kepemilikan Nuklir AS**

Sebulan sebelum PD II terjadi tepatnya pada 2 Agustus 1939, ilmuwan Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Dalam suratnya Einstein mengabarkan bahwa Jerman tengah giat memurnikan uranium-235 dan kemungkinan akan mengembangkan penemuan baru ini menjadi bom atom. Bom berbahan bakar zat radioaktif ini belum pernah dibuat di manapun. Kekuatannya yang berjuta-juta kali lipat bahan peledak konvensional trinitro toluene (TNT) bisa menghancurkan kota dalam hitungan detik.

Tidak lama setelah menerima Presiden surat Einstein, AS segera menggelar suatu proyek rahasia yang disebut “Project Manhattan”. Seratus ribu orang diperkerjakan dalam pabrik-pabrik yang dibangun di Hanford, Washington, Oak Ridge, Tennese, dan di laboratorium utama di Los Alamos, New Mexico seluas 20.000 hektar. Proyek ini dilakukan di bawah pengawasan J Robert Oppenheimer, seorang ahli fisika nuklir. AS mencanangkan biaya sebesar dua milyar dollar untuk penelitian dan penciptaan bom atom antara 1939-1945.

Enam tahun kemudian, Little Boy seberat 4,5 ton dijatuhkan di atas Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Bom uranium-235 ini membuat cendawan debu hingga ketinggian 45.000 kaki dengan ledakan dahsyat berantai, kilatan api dan gelombang kejut berkecepatan 1.100 kaki per detik. Belum lagi efek ledakan ini menimbulkan hembusan angin berkecepatan ratusan mil per jam hingga radius puluhan mil. Sebanyak 137.000 nyawa terenggut dalam hitungan detik, begitupun gedung-gedung, jembatan, dan semua instalasi hancur tak bersisa. Selang tiga hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, Fat Man yang merupakan bom bermuatan plutonium-239 menelan korban 78.000 jiwa. Perang Dunia II pun berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Namun lebih dari itu dunia telah menyaksikan penemuan baru yang sulit diterima oleh akal.[[77]](#footnote-78)

Semenjak itulah isu nuklir mencuat kepermukaan dan menjadi perbincangan dunia. Pasca terjadinya bom di Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi pertanda berakhirnya Perang Dunia II kondisi keamanan dunia belum sepenuhnya damai. Muncul babak baru dalam sejarah dunia yaitu Perang Dingin (*Cold War*) antara Blok Barat yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet. Perang Dingin pada dasarnya merupakan penyebaran pengaruh melalui ideologi yang dianut masing-masing blok, Blok Barat dengan ideologi liberalis kapitalis dan Blok Timur dengan ideologi Sosialis Komunis.

Perang Dingin yang terjadi dalam kurun waktu 1947 sampai 1991 yang pada awalnya merupakan penyebaran ideologi politik pada perkembangannya menjadi persaingan ekonomi, teknologi, bahkan militer. Hal tersebut termanifestasi dengan dibentuknya pakta-pakta pertahanan oleh masing-masing blok. Blok Barat mendirikan North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada tahun 1949 dan Blok Timur membentuk Pakta Warsawa, sebuah aliansi militer pada tahun 1955. Meskipun kedua blok tersebut tidak pernah melakukan perang secara terbuka dikarenakan kapabilitas senjata nuklir yang dimiliki oleh kedua belah pihak, namun perlombaan kapabilitas senjata nuklir kedua blok terus bergulir. Hal ini berpengaruh pada kepemilikan senjata nuklir oleh sekutu masing-masing blok.

Kebijakan glasnost dan perestroika serta runtuhnya tembok Berlin menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin, namun masalah nuklir tidak lantas terselesaikan. Muncul masalah-masalah baru yaitu kepemilikan senjata nuklir oleh Negara satelit Uni Soviet, seperti Kazakhstan yang memiliki 1.400 senjata nuklir dari Uni Soviet dan memindahkan kesemuanya ke Rusia pada 1995.

Energi nuklir Amerika Serikat saat ini selain digunakan untuk keperluan senjata militer, kegunaan energi nuklir di Amerika Serikat ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti menggunakan teknologi nuklir untuk keperluan energi listrik, keperluan medis serta keperluan-keperluan lain yang memberikan dampak positif bagi rakyatnya.

Menurut data pada tahun 2013 tenaga nuklir sudah menjadi sumber utama bahan baku industri. Pasokan bahan baku dari pembangkit tenaga nuklit kini menyumbang 10% listrik AS. Sebagai perbandingan, pembangkit listrik tenaga air hanya menyumbang 6%, kombinasi energi surya, biomassa, angin dan energi panas bumi hanya 3%.[[78]](#footnote-79)

**2.3. Kebijakan AS dalam Penggunaan dan Pengawasan Senjata Nuklir**

Berikut ini adalah beberapa sikap dan kebijakan AS terhadap negara-negara non-nuklir (Non-nuclear Weapon States) yang diduga memiliki senjata pemusnah massal dan diduga melakukan pengembangan energi nuklir bukan untuk kepentingan damai.

**2.3.1 Sikap Amerika Serikat dalam membuktikan senjata pemusnah massal Irak**

Invasi AS ke Irank yang terjadi pada tahun 2003, menurut Abdul Halim Mahally memiliki tiga tujuan yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal,menyingkirkan ancaman terroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi di Irak.[[79]](#footnote-80)

Bila benar tiga alasan tersebut menjadi latar belakang penyerangan AS ke Irak, maka dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara adikuasa S memiliki tujuh cara, yaitu : pertama, mempertahankan warga negara Amerika Serikat, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk mempertahankan sekutu-sekutunya dari berbagai serangan yang berbentuk apapun.

Kedua, menjaga perdamaian dunia dari berbagai macam agresi yang dianggap berpotensi mengganggu perdamaian dunia. Ketiga, senantiasa mempertahankan kepentingan AS. Keempat, menyebarluaskan demokrasi ke seluruh belahan dunia. Kelima, mencegah proliferasi senjata nuklir. Keenam, senantiasa berupaya menjaga bentuk rasa percaya dunia internasional terhadap AS. Ketujuh, memerangi kelaparan, kemisikinan dan berbagai macam pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).[[80]](#footnote-81)

Invasi AS ke Irak sesuai dengan poin kedua tentang isu perdamaian dunia dalam hal ini terorisme, keempat tentang penyebarluasan demokrasi dan dalam hal ini AS melihat bahwa adanya penindasan rezim pemerintahan Saddam Hussein terhadap rakyatnya, dan kelima yaitu mencegah proliferasi nuklir yang dalam hal ini AS menduga adanya pengembangan senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh Irak. Hal tersebut menjadi motif penyerangan AS ke Irak.

Hal senadapun diungkapkan oleh Wirawan Sukarmo tentang motif penyerangan AS ke Irak, namun Wirawan mengungkapkan hanya terdapat dua alasan yang melatar belakangi serangan AS ke Irak. Pertama, keinginan AS untuk menghentikan proyek pengembangan senjata pemusnah massal di Irak. Kedua, menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap memiliki hubungan dengan Al-Qaeda yang mengancam stabilitas regional.

Dari kedua alasan utama tersebut, Pemerintah AS menjabarkannya dalam beberapa misi mereka untuk Irak. Beberapa misi tersebut antara lain : (1) Mengakhiri rezim Saddam Hussein; (2) Mengidentifikasi mengisolasi, dan mengeliminasi senjata pemusnah massal; (3) Mencari, menangkap, dan membawa keluar teroris dari negara itu; (4) Mengumpulkan data intelijen terkait yang bisa digunakan dalam jaringan pemberantasan terorisme internasional; (5) Mengumpullkan data intelijen yang terkait dengan jaringan global di pasar gelap perdagangan senjata pemusnah massal; (6) Mengakhiri sanksi dan secepat mungkin mengirim bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak; (7) Mengamankan sumber-sumber ladang minyak yang menjadi milik rakyat Irak; (8) AS akan menjadi penolong rakyat Irak menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang representatif.[[81]](#footnote-82)

Dari semua analisis terhadap motif invasi AS yang sesungguhnya, terdapat persepsi umum bahwa ekonomi yang menjadi faktor dominan. Beberapa perhitungan yang terkait dengan motif ekonomi dan bisnis dari serangan AS atas Irak antara lain :

* Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Centre for Global Energy Studies (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 miliar barrel cadangan minyak. Berdasarakan data tersebut, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia. Selain itu, menurut US Energy Information Administration, Irak memiliki 73 ladang minyak mentah dan hanya 15 ladang yang telah dikembangkan.
* Ingin menciptakan tatanan dunia baru yang lebi aman dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini merupakan strategi geopolitik AS di kawasan Timur Tengah. Bagi AS, Irak merupakan ancaman potensial bagi kepentingannya dan sekutu terdekatnya Israel di kawasan Timur Tengah.
* Proyek rekonstruksi pasca perang yang akan menguntungkan AS. Kehancuran infrastruktur akibat perang akan melahirkan proyek-proyek rekonstruksi dengan dana yang besar. Sebagai pemeran utama investasi, AS akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk meraup keuntungan besar pasca perang.[[82]](#footnote-83)

Adapun jalannya invasi AS ke Irak itu sendiri dalam pelaksanaannya, pada awal mula AS mengerahkan tahap demi tahap kekuatan militernya di perbataasan Irak. Skuadron udara dengan pesawat tempur F-15, F-16, AV-8 Harrier, A-10 Warthog dan pesawat pembom B-1, B-2, B-523, pesawat “siluman” F-17, pesawat pemandu AWACS, pesawat pengintai U-2, serta beberapa kapal induk, dan pasukan marinir dan infanteri telah disiagakan menunggu komando serangan. Presiden AS, George W. Bush mengeluarkan ultimatum kepada Irak bahwa dalam jangka waktu 48 jam, presiden Irak Saddam Hussein dan anak-anaknya harus meninggalkan Irak. Ultimatum itu berakhir pada 20 Maret 2003 dan beberapa jam sebelum perang dimulai, AS menghimbau agar tentara Irak tidak melakukan perlawanan terhadap tentara AS dan mengajak tentara Irak untuk membangkang terhadap Saddam Hussein.[[83]](#footnote-84)

Presiden Irak Saddam Hussein mempunyai pasukan berjumlah sekitar 500 ribu. Rinciannya adalah, Pasukan Berani Mati (40.000 orang), Garda Republik (80.000 orang), Angkatan Darat (295.000 ribu orang) dan Polisi Rahasia Irak (125.000 orang). Dalam menghadapi kekuatan militer AS dan sekutu, tentu Irak tidak bisa menandingi kekuatan AS. Meskipun semangat rakyat Irak untuk mempertahankan negara Irak dari invasi pasukan asing sangatlah tinggi, tetapi secara militer mereka tidak pernah mampu melawannya secara terbuka. Dari jumlah anggaran pertahanan, Irak tertinggal jauh dari AS. Irak hanya menghabiskan sekitar 1,4 miliar US$, sementara jumlah yang dihabiskan oleh AS sebesar 400 miliar US$.

Secara keseluruhan ada sekitar 250.000 pasukan AS dan 10.000 pasukan Inggris yang didukung 1.000 pesawat tempur dan pembom serta helikopter tempur yang siap menyerang Irak. Di laut, kapal-kapal induk AS siap melaksanakan operasi udara setiap saat. Sementara di pihak Irak, rakyat sipil dan militer Irak menujukkan dukungan kepada Saddam Hussein dan menyatakan siap berkorban jiwa dan raga menghadapi invasi AS.[[84]](#footnote-85)

Perang yang tidak imbang antara AS dan Irak membuat perang berlangsung dengan cepat. Tanggal 9 April 2003 perang dinyatakan berhasil dengan dikuasainya kota Baghdad, yang merupakan pusat pemerintahan Saddam Hussein oleh pasukan AS. Namun senjata pemusnah massal yang menjadi alasan utama serangan AS dan sekutu ke Irak tidak juga diketemukan.[[85]](#footnote-86)

Secara resmi invasi ini berakhir pada 1 Mei 2003, Presiden AS George W. Bush menyatakan misi sudah tercapa saat berpidato di kapal induk USS Abraham Lincoln[[86]](#footnote-87), dan AS mulai menarik seluruh pasukannya pada akhir tahun 2011 pada masa rezim pemerintahan Barack Obama.

**2.3.2 Sikap Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir India**

India mengembangkan nuklirnya untuk dua tujuan, mendapatkan kemampuan pengembangan senjata demi kepentingan nasional India (alasan pertahanan) dan juga mengembangkan nuklir untuk mencukupi kebutuhan negerinya. Kebutuhan energi India meningkat tajam seiring pertumbuhan perekonomiannya yang menakjubkan, 6-7% per tahun dimana sekarang India bersama Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia.[[87]](#footnote-88)

Pada tahun 2008 India sudah memiliki 17 pembangkit nuklir dengan operasional yang mampu membangkitkan tenaga sebesar 4.120 Mega Watt, sementara itu India masih menunggu penyelesaian pembangunan 6 pembangkit nuklir lainnya yang diperkirakan akan mampu menambah suplai pasokan energi listrik sebesar 3.160 MW kedepannya. India sendiri memiliki tujuan jangka panjang untuk mengembangkan lebih banyak reaktor nuklir dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas teknologi pembangkit nuklirnya demi memenuhi target pada tahun 2020 menghasilkan 20.000 MW demi mencapai 10% kontribusi energi nasionalnya.[[88]](#footnote-89) Namun dalam perkembangannya, India mengalami berbagai masalah mulai dari pengayaan bahan baku, pengembangan teknologi, hingga besarnya tekanan dari negara-negara lain terutama negara-negara di kawasan Asia.

Kesulitan ini sebetulnya dapat diselesaikan andai saja India mendapatkan dukungan dan bantuan dari negara-negara penyuplai nuklir (Nuclear Supplier Group, NSG) yang bukan saja mampu memberikan dukungan teknis namun diharapkan mampu membantu mengatasi masalah pasokan uranium lewat mekanisme perdagangan internasional. Sayangnya, status India sebagai negara yang tidak menandatangani NPT mengahalangi bantuan tersebut, karena hanya negara yang menandatangani NPT-lah yang diperbolehkan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil. Polemik permasalahan inilah yang kemudian menyudutkan India yang tetap bersikeras berupaya mengembangkan teknologi nuklirnya dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Apalagi setelah India melakukan uji coba nuklir pada tahun 1998 tekanan internasional semakin menguat dan termaterialisasi dalam bentuk sanksi yang diberikan pada India atas tindakannya yang dinilai membahayakan kestabilan dan keamanan kawasan Asia Selatan.[[89]](#footnote-90)

Adiministrasi Bush dalam hal ini mencoba mengambil langkah yang berbeda, dimulai pada tahun 2001 ia mencabut sanksi internasional yang dikenakan AS terhadap India. Pembicaraan dan upaya persuasi-pun terus dilakukan oleh pemerintah AS – India sehingga pada tahun 2005, melalui pembicaraan awal antara PM India Momohan Singh dan Presiden Bush terciptalah embrio kesepakatan yang selanjutnya akan melahirkan *US-India nuclear* *deal 2008.*

Persetujuan nuklir India – AS (dinamakan juga *Indo-US nuclear deal*) adalah kesepakatan bilateral mengenai penggunaan nuklir untuk tujuan damai natara pemerintah AS dan pemerintahan India. Dalam kesepakatan India diminta memisahkan fasilitas nuklir sipil dan militernya dan bersedia untuk senantiasa diperiksa dan diawasi oleh badan pengawas energi atom internasional (*International Atomic Energy Agency,* IAEA). Sebagai gantinya AS harus mau bekerjasama dengan India dalam sector penggunaan nuklir untuk tujuan sipil, baik dalam hal transfer teknologi, perdagangan bahan bakar uranium maupun *technical support*. Kebijakan ini juga akan memungkinkan India bekerja sama dengan negara lain yang merupakan negara-negara penyuplai nuklir (*NSG*) seperti Kanada, Australia, Perancis Maupun Russia.[[90]](#footnote-91)

**2.3.3 Sikap Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Korea Utara**

Perkembangan nuklir Korea Utara bukanlah hal baru bagi dunia Internasional, karena Korea Utara telah memulai program nuklirnya pada pertengahan tahun 60-an yaitu pada tahun 1965 dengan dibangunnya reaktor nuklir model Uni Soviet untuk tujuan penelitian di Yongbyeon. Semenjak itu terus mengalami perkembangan dan pada 1970 dibangun reaktor nuklir kedua.

Pada tahun 1968 dibentuknya sebuah Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Korea Utara ikut tergabung dalam keanggotaan negara-negara NPT setelah menandatangani atau meratifikasi pada tahun 1985. Pada tahun yang sama awal mula adanya tuduhan dari Amerika Serikat bahwa Korea Utara telah membangun reaktor nuklir secara rahasia.

Maka pada tahun 1992 Korea Utara menjalin kesepakatan dengan badan Atom PBB yaitu IAEA untuk melakukan pengawasan terhadap program nuklirnya. Namun dalam perkembangannya Korea Utara menolak hadirnya pengawas dari IAEA dan pada tahun 1998 Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya dengan meluncurkan rudal dengan jangkauan jelajah 1.700-2.200 km.

Akhirnya pada tahun 2003 Korea Utara mengumumkan secara resmi kemundurannya sebagai anggota NPT. Semenjak itulah diadakannya pertemuan-pertemuan antara Korea Utara dengan negara-negara yang tergabung dalam pertemuan six party talk. Pertemuan ini beranggotakan Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang, China dan Russia. Six party talk merupakan pertemuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk denuklirisasi Korea Utara. Meruncingnya perseteruan antara Korea Utara dan Amerika Serikat terus diwaranai dengan berbagai macam dinamika yang dituangkan oleh masing-masing negara dalam kebijakannya dan menimbulkan dampak-dampak baru dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan kedua negara tersebut.

Setelah keluar dari keanggotaan NPT pada 2003, selanjutnya pada bulan Februari 2005 Korea Utara mengumumkan secara resmi kepemilikan senjata nuklirnya dan tidak akan hadir dalam pertemuan Six Party tanpa batas waktu. Namun pada KTT di Rusia, pemimpin Korea Selatan dan Cina menghimbau Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan Six Party. Akhirnya Korea Utara mengumumkan bahwa pihaknya akan kembali ke pertemuan Six Party setelah menjalin komunikasi dengan Washington.

Pada tanggal 13-16 September 2005, pertemuan nuklir Six Party ke-4 di Beijing menerapkan kesepakatan bersama yang terdiri dari 6 poin pada 19 September, termasuk persetujuan bahwa Korea Utara akan membuang semua senjata nuklirnya dan rencana program nuklir mereka. Namun secara mengagetkan Korea Utara kembali melakukan percobaan nuklirnya yang kedua pada 2006. Dewan Keamanan PBB secara tegas langsung mengeluarkan dan mengesahkan resolusi kecaman peluncuran nuklir Korea Utara tersebut, Korea Utara menolak resolusi tersebut.

Setelah melakukan serangkaian perundingan akhirnya pada tahun 2009 Dewan Keamanan PBB menetapkan resolusi nomor 1874 untuk memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Kementrian Luar Negeri Korea Utara mengumumkan bahwa jumlah total plutonium yang baru diekstraksi, dikembangkan sebagai senjata dan pihaknya melakukan penganyaan uranium.

Lagi-lagi pada tahun 2012 Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh Unha nomor-3 di wilayah Dongchang-ri, Cheolsan-gun, provinsi Pyongyang Utara. Roket itu ternyata gagal memasuki orbit. Dewan Keamanan PBB langsung menetapkan pernyataan untuk mengecam Korea Utara pasca peluncuran roket. Dengan segala ketetapan, Korea Utara kembali meluncurkan roket jarak jauh Unha nomor-3 di Dongchang-ri dan berujung sukses.

Dewan Keamanan PBB menetapkan resolusi nomor 2087, sanksi terhadap Korea Utara. Kementrian Luar Negeri Korea Utara menyatakan pembatalan denuklirisasi di Semenanjung Korea dan mengambil tindakan balasan secara fisik. Komite Pertahanan Korea Utara menegaskan bahwa peluncuran roket jarak jauh dan pelaksanaan uji coba nuklir ditargetkan menuju Amerika Serikat. Pada bulan Februari 2012 Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga, maka DK PBB menetapkan rancangan resolusi nomor 2094 untuk memberlakukan sanksi lebih keras. Kementrian Luar Negeri Korea Utara menyatakan akan melaksanakan hak serangan pendahuluan nuklir.[[91]](#footnote-92)

Presiden Barack Obama sebagai Presiden Amerika menyampaikan tanggapannya terhadap kasus Korea Utara. Obama mengatakan bahwa tidak seorangpun ingin menyaksikan perang di Semenanjung Korea. Tapi Obama juga menegaskan Amerika Serikat akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri dan sekutunya. Pasukan Amerika Serikat dan Korea Utara dalam siaga tinggi untuk menghadapi uji coba misil Korea Utara.[[92]](#footnote-93)

1. Baca lengakap dalam buku Adel, El-Gogary, *Ahmadinejad:The Nuclear Savior Of Tehren Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis* (Terjemahan oleh Tim Kuwais. 2006) (Depok: Penerbit Pustaka IIMAN), Hlm. 158 [↑](#footnote-ref-2)
2. International Institute for Strategic Studies, *Iran's Strategic Weapons Programmes: A Net Assessment*, (London: Routledge, 2005), Hlm. 16. [↑](#footnote-ref-3)
3. Euro Move Publications, EU Action on Iran, (April 2012) <http://www.euromove.org.uk/index.php?id=19016> [↑](#footnote-ref-4)
4. Nuclear Threat Initiative, Iran: Nuclear, (terakhir diperbarui pada tahun 2015) <http://www.nti.org/country-profiles/iran/nuclear/> [↑](#footnote-ref-5)
5. Paul K. Kerr, *Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with International Obligations, Congressional Research Service*, (2015), Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
6. Adel, El-Gogary *Ahmadinejad:The Nuclear Savior Of Tehren Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis* (Terjemahan oleh Tim Kuwais. 2006) (Depok: Penerbit Pustaka IIMAN), Hlm. 131. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
8. IAEA, “*Implementation of The NPT Safeguard Agreement and Revelant Provisions of Security Council Resolutions in The Islamic Republic Of Iran*” dalam, <http://isis-online.org/upload/isis-report/document/IAEA_Iran_8nov2011.pdf>, [↑](#footnote-ref-9)
9. European Union External Action, *Instrument for Nuclear Safety Co-Operation*, <http://eeas.europa.eu/nuclear_safety/index_en.htm> [↑](#footnote-ref-10)
10. Clara Portela, *The Role Of the EU in the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: The Way to Thessaloniki and Beyond*, Peace Research Institute Frankfurt, PRIF Report No. 65, Hlm. 3. [↑](#footnote-ref-11)
11. Baca lengkap dalam “*Egypt-Rusia Reactor Deal Raises Profileration Fears In Wake Of Iranian Advancement*” dalam <http://www.thetower.org/1636oc-egypt-rusia-reactor-deal-raoses-profileration-in-wake-of-iranian-advancement/>. [↑](#footnote-ref-12)
12. [*The Guardian*, "Iran nuclear deal reached in Vienna," July 14, 2015](http://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-deal-expected-to-be-announced-in-vienna) [↑](#footnote-ref-13)
13. [*Wall Street Journal*, "Iran, World Powers Reach Nuclear Deal," July 14, 2015](http://www.wsj.com/articles/iran-world-powers-reach-nuclear-deal-1436861667) [↑](#footnote-ref-14)
14. *Pew Research Center*, "Support for Iran Nuclear Agreement Falls" pada <http://www.people-press.org/files/2015/09/09-8-2015-Iran-release1.pdf>, *Gallup*, "Iranians See Nuclear Deal as a Turning Point" pada <http://www.gallup.com/poll/186710/iranians-nuclear-deal-turning-point.aspx> [↑](#footnote-ref-15)
15. <https://ballotpedia.org/Iran_nuclear_agreement:_An_overview> [↑](#footnote-ref-16)
16. [*NBC News*, "'Vigor and Vigilance': Hillary Clinton Outlines Iran Deal Approach," September 9, 2015](http://www.nbcnews.com/storyline/iran-nuclear-talks/hillary-clinton-announce-plan-counter-iran-n423901) [↑](#footnote-ref-17)
17. *DonaldJTrump.com*, "Donald J. Trump Foreign Policy Speech" [↑](#footnote-ref-18)
18. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3S, 1994), hlm. 118-119. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mochtar Kusumamaatmadja, *Politik Luar negeri dan Pelaksanaannya Dewasa Ini* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal 52 [↑](#footnote-ref-20)
20. Jack C. Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin), (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 155 [↑](#footnote-ref-21)
21. Michael Agnes*, Webster Merriam, webster’s new world mini dictionary ed, 1st edition*, India; IDG Books, hlm 400 [↑](#footnote-ref-22)
22. James N Rosenau, *World Politic; an Introduction* (The Free Press Milan Publisher, London, 1970), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-23)
23. Howard Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach* (Ohio: Charles E. Merill Publishing Company: Columbus, 1947), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-24)
24. K.J. Holsti, *International Politics : A Framework of Analysis,* hlm. 82 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid, hlm 271-274 [↑](#footnote-ref-26)
26. Kirdi Dipoyudo. 1989. *Aspirasi Perdamaian : Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia*. Analisis CSIS tahun XVIII. Hlm. 147 [↑](#footnote-ref-27)
27. John P*. Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*, (New York: Holt Rinchant and Winston Inc. Chapter 3) [↑](#footnote-ref-28)
28. Ragil Wibisono, “*Respon Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010*” dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2380/1/102273-RAGIL%20WIBISONO-FISIP.PDF> [↑](#footnote-ref-29)
29. “Ask The Expert:WHAT Would Iran do with The Bombs?”. dalam <http://www>. cfr.org/zenko/2012/02/21/ask-the-expert-what=would-iran-do-with-a-bom/ [↑](#footnote-ref-30)
30. Jack C Plano & Olton Roy, *Kamus Hubungan Internasional*, terjemahan Wawan Juanda, ( CV. A. Bardin, Bandung) Hlm 55. [↑](#footnote-ref-31)
31. Andhika, “*Perspektip Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir*”, dalam <http://www.andhika.doc-eprint.undip.ac.id> [↑](#footnote-ref-32)
32. Bantarto Bandaro. 1991. *Diplomasi Indonesia : Dahulu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta : CSIS hlm. 47 [↑](#footnote-ref-33)
33. Sukawarsini Djelantik. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 142 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibid hlm. 31 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid hlm. 142 [↑](#footnote-ref-36)
36. “ Isu nuklir Iran dan dilemma Keamanan”, dalam <http://Indonesia.ws.irib.ir/artikel/wacana/item/46979-Isu_Nuklir_Iran_dan_dillema_kemananan>*.*  [↑](#footnote-ref-37)
37. <https://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/iran-nuclear-talks-timeline> [↑](#footnote-ref-38)
38. <https://www.ijhsss.com/files/Sartipi-Hossain.pdf> [↑](#footnote-ref-39)
39. <http://www.softilmu.com/2014/08/pengertian-perjanjian-internasional.html> [↑](#footnote-ref-40)
40. <http://www.zonasiswa.com/2014/11/perjanjian-internasional-lengkap.html> [↑](#footnote-ref-41)
41. Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-42)
42. Oman Heryawan, *Panduan Penyusunan Skripsi, Bandung: Jurusan Ilu hubungan Internasional FISIP UNPAS*, 2008, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-43)
43. Hendrajit dkk, Tangan-Tangan Amerika “Operasi Siluman di Berbagai Belahan Dunia”, (Jakarta: Global Future Institute, 2010) hlm 99. [↑](#footnote-ref-44)
44. Abdullah Alamudi, Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, (Jakarta: USIS, 1989), hlm 33-34 [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibid [↑](#footnote-ref-46)
46. Hendrajit, op cit., hlm 100 [↑](#footnote-ref-47)
47. Abdullah Alamudi, Op.cit, hlm 34 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibid. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid., hlm 106 [↑](#footnote-ref-51)
51. Ibid. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ibid. [↑](#footnote-ref-53)
53. Dewi Fortuna Anwar, “Tatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat” Jurnal Demokrasi dan HAM Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003, hlm 9 [↑](#footnote-ref-54)
54. Ibid., 11 [↑](#footnote-ref-55)
55. Ibid. [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid. [↑](#footnote-ref-57)
57. Ibid., hlm 12 [↑](#footnote-ref-58)
58. Ahmad Jamaan, “Politik Hukum Internasional Dalam Konflik Nuklir Iran - AS ‟, Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Vol. 14, No. 1 Juli 2007 hlm 38 [↑](#footnote-ref-59)
59. HS Karyono, dkk, *Indonesia and Nuclear Iran’s Issue*, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta. 2005 Hlm. 30 [↑](#footnote-ref-60)
60. Sri Winingsih, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangn Nuklir Iran, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009, hlm. 28 [↑](#footnote-ref-61)
61. Ibid. [↑](#footnote-ref-62)
62. Musthafa A Rahman, Iran Pasca Revolusi “Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif”,Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 206 [↑](#footnote-ref-63)
63. Ahmad Jamaan, Op.cit hlm 45 [↑](#footnote-ref-64)
64. Dewi Fortuna Anwar, Op.cit hlm 16 [↑](#footnote-ref-65)
65. Ibid. [↑](#footnote-ref-66)
66. Joseph S. Nye Jr, The Paradox of American Power: Why The World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 138 [↑](#footnote-ref-67)
67. Dewi Fortuna Anwar, Loc.cit [↑](#footnote-ref-68)
68. Hendrjit, Op.cit, hlm 116 [↑](#footnote-ref-69)
69. Joseph S. Nye Jr, Op.cit, hlm 141 [↑](#footnote-ref-70)
70. Dewi Fortuna Anwar, Op.cit, hlm 13 [↑](#footnote-ref-71)
71. Ibid, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-72)
72. Ibid, hlm 21-22 [↑](#footnote-ref-73)
73. Ibid, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-74)
74. Ibid, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-75)
75. Alfian Hamzah & Musa Kazhim, Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran Skenario Penghabisan, Cahaya Insan Suci, Jakarta, 2007, hlm. 126 [↑](#footnote-ref-76)
76. Hendrajit, Op.cit, hlm 83 [↑](#footnote-ref-77)
77. Sejarah Perkembangan Nuklir <http://lemjiantek.mil.id/article-212-sejarah-perkembangan-nuklir.html> [↑](#footnote-ref-78)
78. <http://id.prmob.net/united-state/rusia/pacific-gas-dan-electric-company-2450144.html> [↑](#footnote-ref-79)
79. Abdul Halim Mahally, Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003 [↑](#footnote-ref-80)
80. Juwono Sudarsono dkk, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 177 [↑](#footnote-ref-81)
81. Wirawan Sukarwo, Tentara Bayaran AS di Irak, Gagas Media, Jakarta, 2009, hlm. 191-192 [↑](#footnote-ref-82)
82. Ibid, hlm. 192-193 [↑](#footnote-ref-83)
83. Usep Romli dkk, Zionis Israel : Di Balik Invasi AS ke Irak, Mujahid, Bandung, 2003, hlm 19 [↑](#footnote-ref-84)
84. Ibid, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-85)
85. <http://id.wikipedia.org//wiki.Baghdad> [↑](#footnote-ref-86)
86. <http://id.berita.yahoo.com/satu-dekade-c-amerika-serikat-ke-irak-010515099.html> [↑](#footnote-ref-87)
87. Securing India’s Energy Needs, diambil dari <http://www.mckinseyquarterly.com/Securing_Indias_energy_needs_1672> [↑](#footnote-ref-88)
88. India and Nuclear Energy, diambil dari <http://www.reuters.com/article/marketNews/idUSDEL16711520080818> [↑](#footnote-ref-89)
89. Hari Wibono, Kebijakan Nuklir Amerika Serikat Terhadap India, makalahhubunganinternasional.blogspot.com [↑](#footnote-ref-90)
90. Ibid. [↑](#footnote-ref-91)
91. KBS World Radio, Korea Utara A-Z, <http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_02.html> [↑](#footnote-ref-92)
92. Obama: Saatnya Korea Utara Menghentikan “Sikap Garang”, <http://www.voaindonesia.com/content/obama-saatnya-korea-utara-hentikan-sikap-garang/1639835.html> [↑](#footnote-ref-93)